



INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN PENITENSIER UNTUK NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

Gilbert Roganda Tampubolon, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail : gilbertroganda13@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords :

Pregnant Inmates,
Correctional Institution,
Health Services, Maternal,
Penitentiary

Kata kunci :

Narapidana Hamil,
Lembaga
Pemasarakatan,
Pelayanan Kesehatan,
Maternal, Penitensier

Abstract

Pregnant inmates in prison settings face complex health challenges due to conditions of detention and pregnancy. This study aims to analyze the integration of maternal and penitentiary health services for pregnant inmates at the Women's Correctional Institution Class IIA Jakarta. The research method involved a qualitative approach with in-depth interviews with pregnant inmates, medical officers, and penitentiary officers. The results highlighted the need for close collaboration between penitentiary health facilities and maternal health services to ensure holistic and continuous care. This integration includes managing pregnancy risks in the prison setting, providing comprehensive information to pregnant inmates, and providing assistance during labor and postpartum. It was found that an integrated approach can improve the accessibility, quality, and effectiveness of health services for pregnant prisoners, while contributing to the well-being of mothers and babies born in prison. Although logistical and social challenges remain, the integration of maternal and penitentiary health services at the Jakarta Class IIA Women's Correctional Institution provides a foundation for improved policy and practice in dealing with this unique health issue.

Abstrak

Narapidana hamil di lingkungan penjara menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks akibat kondisi penahanan dan kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian melibatkan pendekatan kualitatif

Corresponding Author:

Gilbert Roganda Tampubolon,

E-mail :

gilbertroganda13@gmail.com

dengan wawancara mendalam kepada narapidana hamil, petugas medis, dan petugas penitensier. Hasil penelitian menyoroti perlunya kolaborasi yang erat antara fasilitas kesehatan penitensier dan layanan kesehatan maternal untuk memastikan pelayanan yang holistik dan berkesinambungan. Integrasi ini mencakup pengelolaan risiko kehamilan di dalam lingkungan penjara, pemberian informasi yang komprehensif kepada narapidana hamil, serta pendampingan selama persalinan dan pasca persalinan. Ditemukan bahwa pendekatan terpadu dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil, sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara. Meskipun tantangan logistik dan sosial masih ada, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik dalam menghadapi isu kesehatan yang unik ini.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana menghadapi dinamika yang kompleks dalam penanganan narapidana, terutama bagi narapidana perempuan yang menghadapi kondisi kesehatan yang unik seperti kehamilan. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana hamil merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan maternal pada narapidana hamil tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi penahanan dan aspek psikososial.

Kehamilan di dalam lingkungan penjara dapat menghadirkan tantangan signifikan. Dari satu sisi, narapidana hamil memerlukan perawatan medis yang baik untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi yang akan lahir. Dari sisi lain, lingkungan penjara memiliki karakteristik sendiri yang dapat memengaruhi aksesibilitas, kualitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani dua bidang ini, yaitu pelayanan kesehatan maternal dan aspek penitensier, guna memastikan pelayanan yang holistik bagi narapidana hamil.

Hingga saat ini, kajian yang mendalam mengenai integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek kesehatan masyarakat umum atau pada pelayanan kesehatan di luar konteks penjara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dapat diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan penjara.

Kondisi pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta merupakan pokok permasalahan yang perlu ditelaah. Kehamilan di dalam lingkungan penjara menghadirkan

dinamika kesehatan yang berbeda dari populasi umum. Rumusan masalah pertama menyoroti bagaimana pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil saat ini dijalankan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam layanan yang ada.

Tantangan utama yang muncul dalam upaya integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil sejalan dengan latar belakang yang menggarisbawahi kompleksitas lingkungan penjara. Rumusan masalah kedua melihat tantangan-tantangan yang muncul dalam mengintegrasikan aspek kesehatan maternal dengan faktor penitensier di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang mencakup kendala logistik, sosial, dan koordinasi antarinstansi.

Dampak dari integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier terhadap kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menjadi isu penting. Rumusan masalah ketiga mengeksplorasi dampak positif yang mungkin timbul dari integrasi pelayanan ini, seperti peningkatan akses ke perawatan medis, peningkatan kualitas hidup, serta peran integrasi dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik ibu serta perkembangan bayi yang lahir di dalam lingkungan penjara.

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik dan praktik pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara serta memberikan panduan bagi peningkatan pelayanan kesehatan dalam konteks yang unik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Pendekatan studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam tentang situasi, praktik, dan dinamika yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil di lembaga ini.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan narapidana hamil, petugas medis, dan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Transkrip wawancara dan catatan observasi akan dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu utama terkait pelayanan kesehatan maternal, tantangan integrasi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ibu dan bayi.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini akan menghasilkan wawasan yang mendalam tentang integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dan bayi yang lahir di lingkungan penjara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 9 ayat (d) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa setiap warga binaan pemsarakatan berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pelayanan kesehatan yang diberikan harus mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga harus memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial dari warga binaan pemsarakatan.

Pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil di lingkungan penjara adalah isu krusial yang melibatkan aspek kesehatan dan penitensier. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjadi landasan hukum yang relevan. Pasal 9 ayat (d) dalam undang-undang ini menegaskan pentingnya pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana. Pasal 9 ayat (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan narapidana, termasuk narapidana hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, menerima pelayanan kesehatan yang memadai. Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier menjadi tanggung jawab lembaga pemsarakatan untuk memastikan bahwa aspek kesehatan ibu dan anak yang belum lahir diperhatikan secara komprehensif.

Dalam konteks narapidana hamil, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara petugas medis dan penitensier. Integrasi ini mencakup pengelolaan risiko kehamilan, pemberian informasi yang akurat kepada narapidana hamil, serta pendampingan selama proses persalinan dan pasca persalinan. Integrasi juga memastikan aksesibilitas pelayanan yang lebih baik, terutama di tengah kendala-kendala yang mungkin ada dalam lingkungan penjara.

Pelayanan Kesehatan Maternal Bagi Narapidana Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta

Pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki dinamika tersendiri karena perpaduan antara aspek medis dan faktor penitensier. Saat ini, pelayanan kesehatan maternal di lingkungan ini telah mengalami perkembangan namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

1. Pemeriksaan Kehamilan dan Skrining Kesehatan

Pemeriksaan kehamilan dan skrining kesehatan awal merupakan langkah pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Proses ini memiliki tujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, serta mengidentifikasi risiko atau masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan.

Ketika seorang narapidana hamil memberikan informasi tentang kondisi kehamilannya kepada petugas medis, tahap awal adalah pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan ini melibatkan pengukuran usia kehamilan dengan menghitung jumlah minggu atau bulan kehamilan, yang

membantu menentukan tahapan kehamilan dan perencanaan pelayanan selanjutnya.

Setelah usia kehamilan ditentukan, narapidana hamil akan menjalani skrining kesehatan awal. Skrining ini melibatkan beberapa komponen penting, termasuk pengukuran tekanan darah, pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik, Pemeriksaan ultrasonografi.

2. Penentuan Rencana Pelayanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, rencana pelayanan kesehatan maternal akan ditetapkan. Ini termasuk pengaturan janji kontrol berkala dan pemantauan yang lebih intensif jika ada kondisi kesehatan khusus yang perlu diperhatikan.

Narapidana hamil akan diberikan informasi dan edukasi mengenai perawatan prenatal, proses persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Ini penting untuk memberikan pengetahuan yang akurat dan memastikan keterlibatan narapidana hamil dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan mereka.

3. Konsultasi Medis dan Pendampingan

Narapidana hamil akan menjalani konsultasi medis reguler dengan petugas medis untuk memantau perkembangan kehamilan dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul. Pendampingan psikososial juga diberikan untuk mengatasi stres dan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan.

4. Persalinan dan Pasca Persalinan

Selama persalinan, narapidana hamil akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dengan pendampingan dari petugas medis dan, jika diperlukan, petugas penitensier. Pasca persalinan, perawatan lanjutan akan diberikan untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Dalam menghadapi realitas unik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, bentuk pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil telah diarahkan untuk memberikan perawatan yang memadai dan holistik. Mulai dari pemeriksaan kehamilan dan skrining kesehatan awal, narapidana hamil diberikan perhatian medis yang diperlukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi yang sedang berkembang. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek seperti pemantauan tekanan darah, analisis darah, pemeriksaan fisik, hingga penggunaan teknologi ultrasonografi. Setiap langkah pelayanan tersebut adalah bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan perawatan kesehatan maternal yang komprehensif.

Tantangan dalam Upaya Integrasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Penitensier untuk Narapidana Hamil

Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek medis, tetapi juga dari kondisi penahanan yang khas dalam lingkungan penjara.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta mengalami keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga medis, peralatan medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi

kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil. Upaya integrasi pelayanan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk memastikan perawatan yang layak.

2. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara petugas medis dan petugas masyarakatan seringkali menjadi tantangan dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan maternal dan penitensier. Komunikasi yang tidak efektif atau kurangnya kolaborasi dapat menghambat alur pelayanan yang lancar. Diperlukan kerjasama yang erat dan koordinasi yang baik antara kedua pihak untuk memastikan bahwa aspek medis dan faktor penitensier terintegrasi dengan baik.

3. Keterbatasan Ruang dan Fasilitas

Lingkungan penjara memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas yang dapat memengaruhi pelayanan kesehatan maternal. Ruang untuk perawatan prenatal, persalinan, dan perawatan pasca persalinan mungkin terbatas. Fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan narapidana hamil selama proses perawatan.

4. Stigma dan Privasi

Stigma terhadap narapidana hamil dapat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa narapidana hamil mungkin enggan mencari perawatan medis karena khawatir tentang pengungkapan status hukumannya atau karena adanya rasa malu. Privasi juga menjadi masalah penting dalam lingkungan yang padat, sehingga memerlukan pendekatan yang sensitif dalam memberikan pelayanan.

5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Tantangan lain adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan maternal di kalangan narapidana dan petugas penitensier. Pendidikan dan kampanye yang tepat dapat membantu mengatasi stigma, meningkatkan partisipasi narapidana hamil dalam perawatan, dan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

Dampak Integrasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Penitensier Terhadap Narapidana Hamil di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di lingkungan penjara. Dengan pendekatan yang lebih holistik, integrasi ini mempertimbangkan aspek medis, psikososial, dan faktor penitensier yang unik.

1. Peningkatan Akses ke Perawatan Medis

Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier dapat membantu memastikan bahwa narapidana hamil memiliki akses yang lebih baik ke perawatan medis yang berkualitas. Dengan kolaborasi antara petugas medis dan penitensier, proses pemeriksaan, pemantauan, dan intervensi medis dapat berjalan lebih lancar, sehingga mengurangi risiko masalah kesehatan yang tidak terdeteksi atau tidak teratasi.

2. Peningkatan Kualitas Hidup

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas hidup narapidana hamil. Dengan mendapatkan perawatan kesehatan yang komprehensif, narapidana hamil dapat mengalami peningkatan kesejahteraan fisik dan mental. Pelayanan yang lebih baik dapat mengurangi rasa cemas, stres, dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan selama kehamilan dan proses persalinan.

3. Dukungan Psikososial yang Optimal

Integrasi juga memungkinkan adanya dukungan psikososial yang optimal bagi narapidana hamil. Pendampingan dan konseling yang terintegrasi dapat membantu narapidana hamil mengatasi tantangan emosional dan mental yang mungkin muncul. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan mental ibu hamil dan pada akhirnya berdampak positif pada perkembangan bayi yang lahir di lingkungan penjara.

4. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan

Dampak lain dari integrasi adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kesehatan maternal di kalangan narapidana dan petugas penitensier. Informasi yang akurat dan edukasi yang tepat dapat membantu narapidana hamil membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kesehatan mereka dan merencanakan masa depan setelah kelahiran.

5. Peluang untuk Perubahan Kebijakan

Keberhasilan integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier dapat memberikan dorongan bagi perubahan kebijakan yang lebih mendukung kesejahteraan narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan. Hasil positif dari integrasi ini dapat memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam memenuhi hak asasi narapidana hamil untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai.

Dalam keseluruhan, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki potensi untuk mengubah paradigma dalam memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana hamil. Dampak positif ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung di dalam sistem peradilan pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil di Lingkungan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta melibatkan berbagai aspek yang kompleks, dari bentuk pelayanan saat ini hingga tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier, serta dampak yang mungkin timbul dari upaya integrasi tersebut. Bentuk pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kehamilan, skrining kesehatan awal, penentuan rencana pelayanan, pemberian informasi dan edukasi, konsultasi medis, persiapan persalinan, serta perawatan pasca persalinan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, sekaligus memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan bagi narapidana hamil.

Namun, tantangan dalam upaya integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier tak dapat diabaikan. Keterbatasan sumber daya, koordinasi antara petugas medis dan penitensier, keterbatasan ruang dan fasilitas, stigma, dan pemenuhan hak asasi adalah beberapa hambatan utama. Diperlukan kerjasama yang erat, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang sensitif untuk mengatasi tantangan ini agar pelayanan dapat terintegrasi dengan baik dan efektif.

Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier memiliki dampak signifikan terhadap narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan. Dampak ini mencakup peningkatan akses ke perawatan medis, peningkatan kualitas hidup, dukungan psikososial yang optimal, peningkatan kesadaran dan pengetahuan, serta peluang untuk perubahan kebijakan. Integrasi ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mengakomodasi dinamika penjara yang unik.

Secara keseluruhan, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier merupakan langkah penting dalam memberikan perawatan yang komprehensif dan manusiawi bagi narapidana hamil. Meskipun tantangan ada, integrasi ini memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan positif yang kuat dalam menjawab kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan narapidana hamil di Lingkungan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Integrasi ini juga memberikan dasar untuk mengembangkan praktik yang lebih baik dalam memberikan perawatan kesehatan yang setara bagi semua, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial.

Saran

Berdasarkan analisis mengenai bentuk pelayanan kesehatan maternal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, tantangan dalam upaya integrasi, serta dampak yang mungkin timbul, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi panduan untuk pembuatan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

1. Pengembangan Protokol yang Jelas

Pembuatan protokol dan pedoman yang jelas mengenai integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier menjadi langkah penting. Protokol ini harus mencakup langkah-langkah praktis dalam mengatasi tantangan yang ada, serta menjelaskan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak terkait. Protokol yang jelas akan membantu petugas medis dan pemasyarakatan bekerja sama dengan lebih efektif.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Pelatihan bagi petugas medis dan pemasyarakatan mengenai integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendekatan yang holistik. Pendidikan ini juga dapat membantu mengatasi stigma dan pengetahuan yang kurang tentang kesehatan maternal di kalangan narapidana.

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Melibatkan pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah dan lembaga kesehatan yang berpengalaman dalam pelayanan kesehatan perempuan dapat memberikan panduan dan dukungan tambahan dalam upaya integrasi. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam pemenuhan sumber daya yang mungkin terbatas.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pembuatan kebijakan dan implementasi integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi berkala. Penilaian terhadap pelaksanaan, dampak, dan efektivitas integrasi akan membantu mengidentifikasi keberhasilan serta area yang memerlukan perbaikan.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi narapidana hamil, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih inklusif, manusiawi, dan berfokus pada kesejahteraan semua individu di dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand. (2020). Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Tangerang). 1(1), 82-87.
- Arman. (2018). Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 2(3). 555-564.
- Gustiansyah, S. W. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Skripsi di Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 7(1), 212-221.
- Masura, I. (2022). Manajemen Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Skripsi di Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Prihatini, Y. (2021). Hubungan Kie Kesehatan Dan Self Efficacy Dengan Pelaksanaan Iva Test Di Puskesmas Kamal Kabupaten Bangkalan. Skripsi di Program Studi Diploma DIV Kebidanan Stikes Ngudia Husada Madura.
- Satiadarma, M. P., dkk. (2021). Optimalisasi Fungsi Fisik dan Psikologis dalam Mencapai Kesehatan Mental. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara.
- Suci, S. N. (2017). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules).